

## LAPORAN



# **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020-2025**



### ***KERJASAMA***

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN BARITO UTARA**

### ***DENGAN***

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TAHUN 2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**


1. Judul Penelitian : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Barito Utara 2020-2025
2. Lokasi : Kabupaten Barito Utara
3. Penanggung Jawab : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
4. Ketua Peneliti  
a. Nama : Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.  
b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IVa  
c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin  
Telp. (0511) 3302789
5. Anggota Peneliti : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum.  
: Husnul Khotimah, A.Md  
: Nurmaya Safitri, SH.
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Barito Utara
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2019

Ketua LPPM  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ir. Danang Bivatmoko, M.Si  
NIP. 196805071993031020

Banjarmasin, Oktober 2019  
Ketua Peneliti



Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.  
NIP. 197306161999031003



## Eksekutif Summary

**Kabupaten Barito Utara** terbilang masih belum cukup dikenal dalam pasar pariwisata. Namun, perkembangan pariwisata di Barito Utara sendiri terus berjalan dengan baik. Sumber daya alam yang melimpah, beranekaragam wisata alam mulai dari area pegunungan sampai hutan hujan dan budayanya yang unik memberikan warna khusus bagi Kabupaten Barito Utara dan menjadi daya saing yang sangat berharga. Daya tarik wisata alam, budaya, religi, dan buatan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pariwisata di Kabupaten Barito Utara masih dalam tahap awal pengembangan, yang biasa diistilahkan sebagai *Exploration Stage*. Pariwisata dalam tahap ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut

1. Tingkat aksesibilitas yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterjangkauan dari provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat aksesibilitas beberapa obyek wisata dari kecamatan di Kabupaten Barito Utara memang sudah cukup baik (dari kacamata skala lokal, lingkup Kabupaten Barito Utara).
2. Tingkat Penyediaan Sarana dan prasarana yang belum memadai. Fasilitas dasar yang dibutuhkan belum tersedia apalagi dengan kualitas yang memadai. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan antara lain penginapan, warung makan, WC, tempat sampah, papan informasi, pos keamanan tempat ibadah, air bersih, listrik, telepon, tempat parkir dan lainnya.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Barito Utara relatif cukup sedikit dan hanya berkembang pada wisatawan lokal atau pengunjung dari Kabupaten Barito Utara sendiri sehingga dapat disimpulkan sektor pariwisata bukan tujuan utama orang datang ke Kabupaten Barito Utara.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan sebuah dokumen strategis, perencanaan praktis yang dapat memberikan arahan dan fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan dari strategi dan program untuk dilaksanakan secara individu maupun bersama-sama menuju pariwisata berkelanjutan. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan pembangunan kepariwisataan menitikberatkan pada empat substansi utama yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Tindak lanjut dari terbitnya undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS sebagai dasar strategi pembangunan kepariwisataan nasional, dan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RIPPARKAB dan RIPPAPROV.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Utara terdiri dari 11 bagian yaitu (1) Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, Keluaran, Ruang Lingkup, Lingkup Wilayah, Lingkup Materi, Lingkup Kegiatan, Landasan Hukum, Metodologi, Kerangka Pendekatan, Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan, Jangka Waktu Perencanaan, Sistematika Pelaporan. (2) Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan yang menjelaskan tentang



kepariwisataan kabupaten barito utara dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, kepariwisataan Kabupaten Barito Utara dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam kebijakan dan pembangunan wilayah. (3) kondisi wilayah provinsi atau kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang menjelaskan tentang kondisi fisik, sejarah sebagai potensi pariwisata, kekayaan ekologis sebagai potensi pariwisata, kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata, perekonomian. (4) Kabupaten Barito Utara sebagai destinasi pariwisata yang menjelaskan tentang daya tarik dan sumber daya wisata (khusus kab/kota), fasilitas pariwisata, fasilitas umum pendukung pariwisata, aksesibilitas pendukung pariwisata, prasarana umum pendukung pariwisata, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia pariwisata. (5) Industri pariwisata yang menjelaskan tentang usaha pariwisata, usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. (6) Pasar pariwisata dan upaya pemasaran yang menjelaskan tentang jumlah dan perkembangan pasar wisatawan, karakteristik pasar wisatawan, upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Utara. (7) Kelembagaan kepariwisataan yang menjelaskan tentang sumber daya manusia pariwisata, asosiasi pariwisata, Kelembagaan pemerintah terkait pariwisata, kelembagaan lain terkait pariwisata. (8) Prinsip dan konsep pembangunan kepariwisataan yang menjelaskan tentang tantangan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan, prinsip pembangunan kepariwisataan, konsep pembangunan kepariwisataan, visi, misi, tujuan pariwisata. (9) Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang menjelaskan tentang kebijakan pembangunan kepariwisataan, strategi pembangunan kepariwisataan. (10) Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata yang menjelaskan tentang rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata. (11) Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan

Visi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2019–2025 adalah “Terwujudnya Pariwisata Barito Utara yang Berkelanjutan dan Mandiri dengan Daya Tarik Internasional” Untuk mencapai visi tersebut maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Membangun destinasi wisata yang unik, bersih, berkarakteristik lokal, dan berorientasi lingkungan; aman dan nyaman
2. Melengkapi dan memelihara akses serta fasilitas–utilitas ODTW;
3. Mewujudkan rangkaian kunjungan wisata terpadu kabupaten;
4. Mewujudkan masyarakat sadar wisata serta kerjasama pengelolaan ODTW dengan masyarakat dan swasta;
5. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
6. Mempromosikan pariwisata Kabupaten Barito Utara ke tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional;
7. Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut disusun juga tujuan, sasaran dan program untuk kurun waktu 2020-2025



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
<i>Eksekutif Summary</i> .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Keluaran.....	5
1.5. Landasan Hukum.....	5
1.6. Metodologi Penyusunan.....	7
1.7. Jangka Waktu Perencanaan.....	9
1.8. Sistematika Pelaporan.....	9
<b>BAB II KEPARIWISATAAN KABUPATEN BARITO UTARA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional.....	11
2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	11
2.1.2 Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.....	11
2.1.3 Rencana induk pembangunan pariwisata Nasional.....	16
2.2. Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah.....	17
2.3. Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah.....	26
<b>BAB III KONDISI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN</b> .....	<b>39</b>
3.1. Kondisi Fisik.....	39
3.2. Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata.....	44
3.3. Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata.....	47
3.4. Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata.....	48
3.5. Perekonomian Barito Utara.....	50
<b>BAB IV KABUPATEN BARITO UTARA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA</b> .....	<b>56</b>
4.1. Daya Tarik dan Sumberdaya Wisata.....	56
4.2. Fasilitas Pariwisata Di Kabupaten Barito Utara.....	59
4.3. Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata di Kabupaten Barito Utara.....	62
4.4. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata.....	64
4.5. Prasarana Umum Pendukung Pariwisata.....	68
4.6. Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata.....	71
<b>BAB V INDUSTRI PARIWISATA</b> .....	<b>74</b>
5.1. Usaha Pariwisata.....	74
5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata.....	79
<b>BAB VI PASAR WISATA DAN UPAYA PEMASARAN</b> .....	<b>81</b>
6.1. Jumlah dan Perkembangan Pasar Pariwisata.....	81
6.2. Karakteristik Pasar Wisatawan.....	82
6.3. Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.....	83
6.3.1. Ruang Lingkup Pemasaran Kepariwisata.....	87
6.3.2. Bauran Pemasaran dan Produk Pariwisata.....	96



6.3.3.	Citra Pariwisata.....	98
6.3.4.	Kemitraan Pemasaran Pariwisata .....	99
6.3.5.	Promosi Pariwisata .....	99
<b>BAB VII KELEMBAGAAN PARIWISATA .....</b>		<b>102</b>
7.1.	Sumber Daya Manusia Pariwisata .....	102
7.2.	Asosiasi Pariwisata .....	103
7.3.	Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata .....	104
7.4.	Kelembagaan lain terkait pariwisata.....	104
<b>BAB VIII PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN .....</b>		<b>106</b>
8.1.	Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata.....	106
8.2.	Prinsip Pembangunan Kepariwisata .....	115
8.3.	Konsep Pembangunan Kepariwisata .....	119
8.4.	Visi Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	121
8.5.	Misi rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Barito Utara.....	122
8.6.	Tujuan dan Sasaran .....	122
<b>BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN .....</b>		<b>127</b>
9.1.	Kebijakan Pembangunan Kepariwisata .....	127
9.2.	Strategi Pembangunan Kepariwisata .....	129
9.2.1	Analisis Faktor Lingkungan Eksternal .....	129
9.2.2.	Analisi Faktor Lingkungan Internal .....	131
9.3.	Strategi Pengembangan Pariwisata .....	146
<b>BAB X PEWILAYAHAN PARIWISATA .....</b>		<b>151</b>
10.1.	Pemetaan Potensi dan Kondisi Destinasi Wisata .....	151
10.2.	Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata .....	156
<b>BAB XI PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN</b>		<b>158</b>
11.1.	Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan dalam semua perwilayahan KPPK (Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten).....	158
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>162</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jangka Waktu Penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara .....	9
Tabel 2. Indikator Kinerja Pariwisata dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.....	18
Tabel 3. Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Barito Utara 2018-2023 .....	19
Tabel 4. Kawasan Strategis Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	21
Tabel 5. Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 .....	34
Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara .....	34
Tabel 7. Renstra Kementerian Pariwisata Nasional .....	37
Tabel 8. Renstra Dins Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.....	37
Tabel 9. Matrik Komparasi Capaian Sasaran .....	38
Tabel 10. Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara .....	39
Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara .....	41
Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Barito Utara.....	41
Tabel 13. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017 .....	42
Tabel 14. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Barito Utara .....	42
Tabel 15. Kondisi Makro ekonomi Kabupaten Barito Utara .....	50
Tabel 16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara .....	52
Tabel 17. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara .....	53
Tabel 18. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara .....	54
Tabel 19. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kalimantan Tengah .....	55
Tabel 20. Potensi Keanekaragaman ODTW di Kabupaten Barito Utara.....	57
Tabel 21. Gambaran Umum ODTW Kabupaten Barito Utara.....	59
Tabel 22. Hotel dan Penginapan di Kabupaten Barito Utara.....	62
Tabel 23. Jumlah Hotel di Kabupaten Barito Utara.....	63
Tabel 24. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Barito Utara.....	64
Tabel 25. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Barito Utara .....	64
Tabel 26. Kondisi panjang Jalan di Kabupaten Barito Utara .....	65
Tabel 27. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara .....	65
Tabel 28. Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Barito Utara .....	67
Tabel 29. Kendaraan Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.....	68
Tabel 30. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Utara .....	68
Tabel 31. Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.....	69
Tabel 32. Produksi dan Pemakaian Listrik Menurut Unit Pembangkit.....	70
Tabel 33. Distribusi air minum menurut jenis konsumen .....	70
Tabel 34. Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon di Kabupaten Barito Utara .....	70
Tabel 35. Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Barito Utara .....	71
Tabel 36. Angka Melek Huruf dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Barito Utara ...	71
Tabel 37. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barito Utara.....	72
Tabel 38. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).....	72
Tabel 39. Sanggar Seni Budaya di Kabupaten Barito Utara .....	73
Tabel 40. Jumlah KunjunganWisata di Kabupaten Barito Utara.....	81
Tabel 41. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Di Kabupaten Barito Utara .....	81
Tabel 42. Karakteristik Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Barito Utara.....	82
Tabel 43. Pola Pengelolaan Pariwisata .....	95



Tabel 44. Pengelompokan SDM Pariwisata.....	102
Tabel 45. Skoring SWOT Destinasi Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	133
Tabel 46. Skoring SWOT Pemasaran Pariwisata Kabupaten Barito Utara.....	138
Tabel 47. Skoring SWOT Industri Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	141
Tabel 48. Skoring SWOT Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	144
Tabel 49. Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kabupaten Barito Utara.....	152
Tabel 50. Program Kegiatan Pembangunan Kepariwisataaan di Kabupaten Barito Utara	160

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Muatan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara.....	7
Gambar 2. Sungai Barito Kabupaten Barito Utara.....	49
Gambar 3. Segmentation, targeting, Positioning .....	89
Gambar 4. Posisi S.W.O.T Destinasi Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	137
Gambar 5. Posisi S.W.O.T Pemasaran Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	140
Gambar 6. Posisi S.W.O.T Industri Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	143
Gambar 7. Posisi S.W.O.T Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Barito Utara.....	146
Gambar 8. Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Barito Utara .....	157





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan guna memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran produk-produk daerah. Terkait dengan hal tersebut pariwisata ditujukan sebagai sektor andalan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan daya saing kepariwisataan serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dan swasta.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah panduan dalam pengembangan daya tarik wisata daerah yang memuat materi pokok ketentuan program kepariwisataan daerah, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata/kawasan. Berlakunya Undang-Undang otonomi daerah merupakan titik tolak yang sangat strategis yang dapat mengoptimalkan dan menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset serta sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu setiap daerah harus mencermati sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan membantu dalam menopang pembangunan daerah, memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan pembangunan kepariwisataan menitikberatkan pada empat substansi utama yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Tindak lanjut dari terbitnya undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS sebagai dasar strategi pembangunan kepariwisataan nasional. Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan wilayah sekitarnya.



Mengingat bahwa perkembangan pariwisata di masa yang akan datang akan menjadi sektor strategis terutama dalam kerangka otonomi daerah seharusnya pengembangan sektor pariwisata perlu mempertimbangkan kepentingan lokal, regional maupun nasional, sebagai berikut :

- a. Kepentingan lokal, yaitu bahwa perencanaan pengembangan pariwisata harus mencerminkan otonomi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan daerah maupun sumber dayanya. Tidak lepas dari itu, pengembangan pariwisata daerah harus juga memperhatikan kelestarian alam dan lingkungannya.
- b. Kepentingan regional, yaitu bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata antar daerah harus diarahkan pada keterkaitan yang saling menunjang dan melengkapi antar daerah, sehingga terjadi kompetisi sehat dan mengurangi friksi yang mungkin timbul akibat perbedaan potensi wisata daerahnya.
- c. Kepentingan nasional, yaitu bahwa dalam rangka pembangunan wilayah maupun pengembangan pariwisata nasional diarahkan untuk mencapai adanya pengoptimalan dan merespon selera pasar pariwisata dunia maupun domestik yang ditunjang promosi internasional yang profesional dan terpadu.

Kabupaten Barito Utara memiliki potensi pariwisata yang besar, beragam, unik, dan tersebar di wilayahnya. Namun, lokasi yang strategis serta dukungan sarana dan prasarana, dirasakan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan kontributor sektor pariwisata ini terhadap perekonomian wilayah. Terkait dengan hal tersebut di atas serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang menetapkan bahwa Kabupaten Barito Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis *Heart of Borneo* (HoB), Cagar alam pararawan I dan II sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu andalan pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Maka sangat relevan jika disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten, sehingga pengembangan kepariwisataan diperoleh acuan sekaligus mengatasi permasalahan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan merupakan arahan dan pedoman yang memayungi keseluruhan rencana dan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Utara, dibuat berdasarkan penelitian, kajian serta keilmuan akademik pada bidang pariwisata serta pada bidang-bidang lain yang terkait. Rencana ini dijabarkan dalam prinsip pengembangan kepariwisataan Kabupaten Barito Utara sebagai arah pengembangan kepariwisataan meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah strategi dan kebijakan, serta pengembangan indikator kegiatan kepariwisataan di masa-masa yang akan datang.



Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS);
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV)
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPARKAB)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam rangka memberikan acuan dalam perencanaan kepariwisataan yang berkelanjutan, serta untuk mensinergikan penyusunan RIPPARNAS, RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA dengan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai entitas dalam pembangunan kepariwisataan daerah perlu menetapkan pedoman penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2025.

## **1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

### **1.2.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Utara ini dimaksudkan untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2025

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara yaitu

- 1) Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang mendesak diagendakan. RIPPARKAB ini juga diharapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang pariwisata.
- 2) Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Utara sebagai pusat destinasi wisata yang unggul dan berdaya tarik tinggi baik secara lokal, regional, maupun nasional.



- 3) Mempercepat pembangunan pariwisata Kabupaten Barito Utara sehingga menjadi salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mempola perkembangan sektor pariwisata yang terstruktur menuju sektor industri kreatif yang berdaya saing
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisata lokal, regional, nasional, dan mancanegara.
- 6) Mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing tinggi dengan indikasi meningkatnya kontribusi terhadap Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan Investasi pada sektor pariwisata.
- 7) Menjadi penggerak perekonomian daerah dengan indikasi meningkatnya usaha pariwisata, kerjasama antara masyarakat, swasta dan instansi pemerintah, memperluas lapangan pekerjaan, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
- 8) Mendorong pelestarian lingkungan dan konservasi sumberdaya lingkungan di daerah tujuan wisata khususnya sumberdaya alam dan lingkungan, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat.
- 9) Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien.
- 10) Menentukan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terukur dan implementatif untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

### 1.2.3. Sasaran

- 1) Menginventarisasi obyek-obyek pariwisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Barito Utara
- 2) Identifikasi potensi dan permasalahan kondisi daya tarik wisata
- 3) Menyusun strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Utara;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD terkait pembangunan pariwisata secara komprehensif; dan
- 5) Indikator kinerja SKPD yang terkait dengan pariwisata di Kabupaten Barito Utara.

## 1.3. Ruang Lingkup

### 1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada posisi 0°49'00"LS – 1°27'00"LS dan 114°20'3"32"BT – 115°50'47"BT, dengan luas wilayah sebesar



8.300 km<sup>2</sup>. Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kabupaten Kapuas dan Murung Raya

### 1.3.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi:

- a. Tinjauan kebijaksanaan mengenai program-program pariwisata secara nasional, regional, sampai tingkat lokal (kabupaten);
- b. Tinjauan mengenai kepariwisataan nasional dan regional;
- c. Karakteristik kawasan atau obyek serta sarana dan prasarana pendukung di kawasan atau obyek wisata beserta potensi untuk pengembangan;
- d. Karakteristik wisatawan (pengunjung dan kunjungan) dalam berwisata;
- e. Karakteristik sarana dan prasarana pendukung wisata yang berada di kawasan maupun diluar kawasan yaitu pada usaha sarana dan jasa wisata antara lain meliputi akomodasi, restaurant, biro perjalanan, jasa pariwisata, dan lain sebagainya;
- f. Karakteristik infrastruktur pada sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) terutama mengenai akses pencapaian ke kawasan atau obyek; serta
- g. Kelembagaan atau institusi baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Barito Utara.

### 1.4. Keluaran

Sedangkan keluaran (*output*) dari pekerjaan penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara tahun 2020-2025 ini adalah:

- a. Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2020-2025;
- b. *Executif Summary* RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara tahun 2020-2025
- c. Data-data dan dokumen digital dalam bentuk data disk

### 1.5. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



- 3) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 7) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 9) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010-2025;
- 14) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No.10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 15) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
- 17) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang RIPPARKAB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

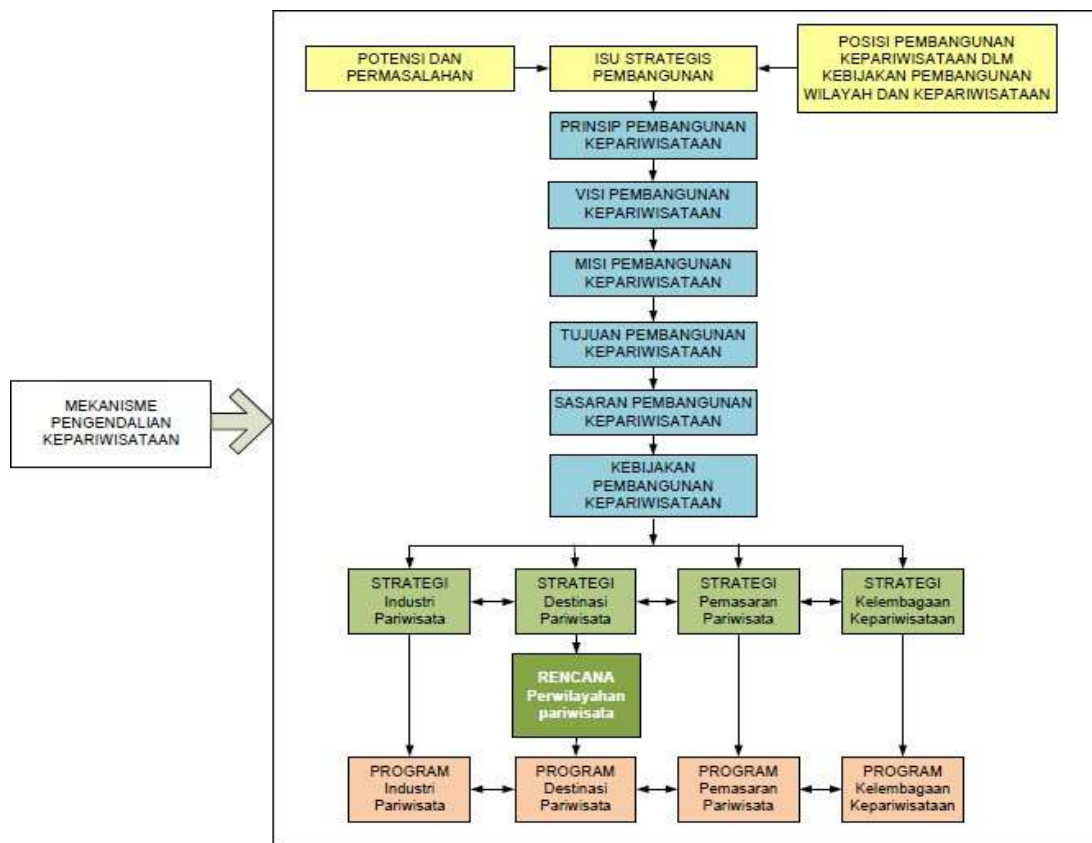


## 1.6. Metodologi Penyusunan

### 1.5.1. Kerangka Pendekatan

RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata.

Kerangka muatan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Muatan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara

Konsep perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, komprehensif, berorientasi system, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan, dengan penekanan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan untuk keterlibatan masyarakat. Penjelasan dari setiap elemen pendekatan perencanaan tersebut sebagai berikut:



- Pendekatan Kontinue, dan fleksibel : perencanaan pariwisata merupakan proses kontinu dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan umpan balik, namun tetap dalam kerangka kerja untuk menjaga azas, tujuan dan kebijaksanaan dasar dari pengembangan pariwisata.
- Pendekatan Sistem : Pariwisata dipandang sebagai system yang saling berkaitan antar setiap elemennya dan harus di rencanakan dengan memanfaatkan teknis analisis system.
- Pendekatan Komprehensif : Berkaitan dengan pendekatan system, yang mana seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata sampai pada elemen kelembagaan, lingkungan dan dampak social ekonomi harus direncanakan dan dianalisis secara menyeluruh dan terukur.
- Pendekatan terintegrasi : berkaitan dengan pendekatan system dan komprehensif, perencanaan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan sebagai sebuah system yang terintegrasi baik untuk pariwisata maupun untuk perencanaan secara keseluruhan dan pengembangan secara total.
- Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan : pariwisata hendaknya direncanakan dengan baik dan tidak mengabaikan serta merusak kondisi lingkungan fisik dan social budaya. Lingkungan fisik dan social budaya hendaknya di jaga sebagai sumber daya permanen untuk pemanfaatan di masa datang, oleh karena itu hendaknya dilakukan analisis daya dukung lingkungan.
- Pendekatan masyarakat : adanya keterlibatan masyarakat dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pengembangan yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak dan bermanfaat secara social, budaya dan ekonomi.
- Pendekatan implementasi: kebijaksanaan, rencana dan rekomendasi pengembangan pariwisata di formulasikan sehingga bersifat realistis dan dapat di implementasikan dengan memanfaatkan teknik-teknik implementasi.
- Pendekatan proses perencanaan sistemik: proses perencanaan bersifat sistematis dengan tahapan yang logis dari setiap aktivitas.





### 1.6.2. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan

Tabel 1. Jangka Waktu Penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Bulan Ke-				
		1	2	3	4	5
1	Persiapan					
2	Pengumpulan data					
3	Diagnosis awal					
4	Perumusan prinsip- prinsip					
5	Perumusan visi dan misi					
6	Perumusan tujuan					
7	Analisis, prediksi, proyeksi					
8	Sintesis					
9	Perumusan kebijakan, strategi, rencana, program					
10	Perumusan mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan					

### 1.7. Jangka Waktu Perencanaan

Pelaksanaan RIPPARKAB Kabupaten Barito Utara ini adalah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dalam rentang tahun 2020-2025.

### 1.8. Sistematika Pelaporan

#### BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Keluaran
- 1.4 Ruang Lingkup
  - 1.4.1 Lingkup Wilayah
  - 1.4.2 Lingkup Materi
  - 1.4.3 Lingkup Kegiatan
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Metodologi
  - 1.6.1 Kerangka Pendekatan
  - 1.6.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
- 1.7 Jangka Waktu Perencanaan
- 1.8 Sistematika Pelaporan

#### BAB 2 KEPARIWISATAAN KABUPATEN BARITO UTARA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

- 2.1 Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional
- 2.2 Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi
- 2.3 Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah



**BAB 3 KONDISI WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

- 3.1 Kondisi Fisik
- 3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata
- 3.3 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata
- 3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata
- 3.5 Perekonomian

**BAB 4 KABUPATEN BARITO UTARA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA**

- 4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata (khusus Kab/Kota)
- 4.2 Fasilitas Pariwisata
- 4.3 Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata
- 4.4 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata
- 4.5 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata
- 4.6 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

**BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA**

- 5.1 Usaha Pariwisata
- 5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

**BAB 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN**

- 6.1 Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan
- 6.2 Karakteristik Pasar Wisatawan
- 6.3 Upaya Pemasaran yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

**BAB 7 KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

- 7.1 Sumber Daya Manusia Pariwisata
- 7.2 Asosiasi Pariwisata
- 7.3 Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata
- 7.4 Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata

**BAB 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

- 8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata
- 8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisata
- 8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisata
- 8.4 Visi
- 8.5 Misi
- 8.6 Tujuan

**BAB 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

- 9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisata
- 9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisata

**BAB 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA**

- 10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata
- 10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata

**BAB 11 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**



## BAB II

### KEPARIWISATAAN KABUPATEN BARITO UTARA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### 2.1. Kepariwisata Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional

##### 2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kepariwisata sebagaimana dijelaskan dalam arah pembangunan jangka panjang nasional dikembangkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

##### 2.1.2 Rencana pembangunan jangka menengah Nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dijabarkan Visi Presiden Republik Indonesia adalah “ **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”. Berdasarkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan dalam 9 agenda prioritas pemerintah yang disebut **NAWACITA**. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir ke 6 yakni : “**Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya**”.

Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum di kelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum di kelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi pembangunan kementerian pariwisata menggunakan pijakan visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tersebut. Sedangkan misi kementerian pariwisata 2015-2019 berdasarkan agenda prioritas tersebut yang tertuang dalam peraturan menteri pariwisata No. 29 tahun 2015 tentang Restra kementerian pariwisata dengan



mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi kementerian pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Misi kementerian pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan kementerian pariwisata 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
4. Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif, efisien dan mencapai produktifitas

Arah dan kebijakan strategi pembangunan pariwisata sebagai berikut:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke wisman mencakup:

- I. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.



- II. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
  - III. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.
2. Pembangunan Destinasi dan pariwisata
    - I. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan *site plan*, rancangan detail, (detail design) kawasan destinasi wisata.
    - II. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
    - III. Meningkatkan citra kepariwisataan
    - IV. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management organisation (DMO).
  3. Pembangunan industri pariwisata
    - I. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
    - II. Fasilitas investasi usaha sektor pariwisata, serta
    - III. Fasilitas pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
    - IV. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.
  4. Pembangunan kelembagaan Pariwisata
    - I. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan;
    - II. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan kemitraan, membangun sekolah wisata;
    - III. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Peraturan presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014 mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014. Peraturan Presiden ini menetapkan 3 prioritas pembangunan, yaitu;

1. Prioritas nasional, berisikan prioritas pembangunan nasional 2010-2014,
2. Memperkuat sinergi antar bidang pembangunan, berisikan prioritas bidang pembangunan, dan
3. Pembangunan berdimensi kewilayahan, berisikan prioritas pembangunan kewilayahan.



Prioritas pembangunan nasional diarahkan kepada percepatan pembangunan fisik, perbaikan infrastruktur sosial, dan pembangunan kreatifitas. Pembangunan terhadap aspek kepariwisataan menjadi satu sub bidang pada prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, mencakup peningkatan jumlah wisatawan mancanegaran dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun, promosi 10 tujuan pariwisata indonesia melalui saluran pemasaran dan periklanan yang kreatif dan efektif, perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata dan peningkatan kapasitas pariwisata pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan asia.

Disebutkan di dalam buku RPJM II Nasional 2010-2014, bahwa kendala yang oleh Indonesia dalam rangka pengembangan kepariwisataan, antara lain:

1. Masih kurangnya kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan tujuan pariwisata nasional. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pengembangan terhadap daya tarik pariwisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.
2. Jumlah investasi di bidang pariwisata menunjukkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata masih belum optimal. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi dan situasi keamanan, serta iklim investasi yang belum kondusif.
3. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technologies*) sebagai sarana pemasaran dan promosi yang masih belum optimal. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana ICTs, seperti internet, saluran telepon, *broadband* untuk mendukung aktivitas *online* para wisatawan belum memadai, baik untuk pemasaran pariwisata maupun memenuhi kebutuhan wisatawan dalam mendapatkan informasi kepariwisataan.
4. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata mulai dari tingkat manajerial dan perencanaan sampai dengan *frontliner* (tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan wisatawan). Hal ini terutama di sebabkan oleh:
  - a) sarana dan prasarana pendidikan pariwisata yang belum memadai; dan
  - b) penerapan standar dan kurikulum pendidikan pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional belum optimal.
5. Masih rendahnya jaringan kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat. Kondisi pengembangan kepariwisataan akan mencapai kondisi yang optimal ketiga pilar pariwisata (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bersedia untuk bersinergi dan membentuk jejaring dalam rangka pengembangan kepariwisataan.



Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas peningkatan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana mendukung pariwisata, melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama kesepuluh tujuan pariwisata Indonesia, dan mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali, termasuk industri kreatif, serta mengembangkan desa wisata.
3. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan periklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar.
4. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Strategi tersebut di atas didukung oleh peningkatan koordinasi kualitas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) pelayanan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, komunikasi dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan, (e) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan kerjasama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas dan kegiatan prioritas kepariwisataan dalam RPJM 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Fokus prioritas pengembangan industri pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
  - a. Pengembangan usaha, industri, dan investasi pariwisata; dan
  - b. Pengembangan standarisasi pariwisata.
2. Fokus prioritas pengembangan tujuan pariwisata yang didukung oleh kegiatan prioritas:



- a. Pengembangan daya tarik pariwisata;
  - b. Pemberdayaan masyarakat di daerah tujuan pariwisata;
  - c. Peningkatan PNPM Mandiri bidang pariwisata; dan
  - d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat jenderal pengembangan tujuan pariwisata.
3. Fokus prioritas pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
- a. Peningkatan promosi pariwisata luar negeri;
  - b. Peningkatan promosi pariwisata dalam negeri;
  - c. Pengembangan informasi pasar pariwisata;
  - d. Peningkatan publikasi pariwisata;
  - e. Peningkatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*meeting incentive travel, Conference, and Exhibition/MICE*); dan
  - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat jenderal pemasaran.
4. Fokus prioritas pengembangan sumber daya pariwisata, yang di dukung oleh kegiatan prioritas:
- a. Pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata;
  - b. Penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan; dan
  - c. Pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata.

Prioritas pembangunan poin 3, yaitu pembangunan berdimensi kewilayahan secara implisit menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya dilakukan dengan cara meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. Salah satu sektor unggulan daerah tersebut antara lain sektor pariwisata. Hal ini tertuang dalam penjabaran pada sub bab pengembangan wilayah pulau-pulau besar di Indonesia yang menyertakan sektor kepariwisataan sebagai salah satu arah pembangunan.

### **2.1.3 Rencana induk pembangunan pariwisata Nasional**

Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Pasal 4 PP 50/2011 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah harus mengacu kepada Ripparnas, sehingga terjadi sebuah sinergi dokumen perencanaan dari atas ke bawah (*top down system*). Sebagai dokumen perencanaan, RIPPARKAB berkedudukan





sebagai bagian integral dari sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang memiliki rentang waktu perencanaan antara 10-15 tahun.

Konsultasi dan koordinasi vertikal mutlak dibutuhkan antara pemerintah daerah dengan kementerian pariwisata mengingat dalam pelaksanaan pembangunan destinasi pariwisata nasional senantiasa melibatkan kawasan pariwisata yang secara administratif merupakan kewenangan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan DPN juga diperlukan dalam rangka melakukan pengendalian implementasi pembangunan DPN dan KSPN melalui peningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Ketertiban pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan DPN juga diperlukan dalam rangka melakukan pengendalian implementasi pembangunan DPN dan KSPN melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Lingkup pengembangan kepariwisataan yang diatur dalam RIPPARNAS mencakup, antara lain destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Tujuan dari pengembangan kepariwisataan di Indonesia antara lain adalah untuk mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional serta memberdayakan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Kondisi yang demikian diharapkan akan memberikan *multiplier effect* berupa peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Indonesia.

## **2.2. Kepariwisataan Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan Pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah**

Urusan pariwisata termuat dalam misi ke 6 (enam) pada RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat digambarkan bahwa provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Destinasi pariwisata di Kalimantan tengah tersebar di 14 kabupaten/kota. Untuk menunjang pariwisata maka setiap tahun di gelar expo/pameran, sebagai media promosi bagi kabupaten/kota memperkenalkan daerahnya dan potensi yang ada.

Kalimantan Tengah memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari ekowisata, wisata religi kuliner, wisata susur sungai, wisata religi ziarah, wisata orang utan, wisata pantai dan danau, dan lain sebagainya. Seni dan budaya yang merupakan



identitas yang harus tetap terpelihara dan terjaga serta dikembangkan dimasa yang akan datang melalui sanggar-sanggar, pedepokan dan organisasi. Berbagai event yang telah terjadwal selama ini tetap diteruskan, baik untuk tujuan wisata maupun dalam rangka pelestarian budaya. Dalam hal pengembangan wisata di Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan “wisata religius” karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau disakralkan.

Dengan melihat potensi dan sumber daya daerah provinsi Kalimantan tengah, pariwisata dan seni budaya merupakan salah satu kekayaan daerah yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang cukup intens. Secara tidak langsung dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan banyak aspek lain yang ikut bergerak secara positif. Misalnya apabila sektor pariwisata berkembang, akan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga PAD meningkat. Pengembangan pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif. Dengan ini diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang mampu menopang dan mendukung berkembangnya sektor ekonomi, yang akan mampu mendongkrak pendapat asli daerah (PAD).

**Tabel 2. Indikator Kinerja Pariwisata dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Bidang Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Kinerja		Perangkat Daerah
			Tahun		
			2016	2021	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Pariwisata	80%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	2	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tingkat Hunian Hotel Privinsi Kalimantan Tengah	80%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: Rencana Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

**Tabel 3. Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Barito Utara 2018-2023**

No	Program	Indikator		
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi wisata & seni budaya daerah	3 Promosi	5 Promosi
		Persentase kunjungan wisata	83,2%	99,8%
2	Program pengembangan kemitraan	Jumlah pelatihan pengembangan SDM	2 Kegiatan	10 Kegiatan
3	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase objek wisata yang dikembangkan	5,77%	36,53%
		Tersedianya data rencana pengembangan objek wisata daerah	1 Tahun	5 Tahun
		Jumlah kelompok sadar wisata	3 Pokdarwis	3 Pokdarwis
4	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD	Tersedianya tanah untuk perluasan jalan masuk objek wisata	0	1 Bidang (tahun 2020)

### 2.2.1. Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pembangunan kepariwisataan provinsi Kalimantan Tengah adalah **“Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mensejahterakan Masyarakat.”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan misi pembangunan kepariwisataan yaitu:

- 1) Membuat provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata nasional;
- 2) Membuat provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan di cintai parawisatawan;
- 3) Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dari sektor pariwisata;
- 4) Memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja sektor pariwisata;
- 5) Mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
- 6) Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
- 7) Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
- 8) Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.



Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

- 1) Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta pelayanannya; dan
- 2) Secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan pariwisata di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:

- 1) Kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan dan jumlah kunjungan wisatawan;
- 2) Tersedia fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- 3) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- 4) Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan, pendapatan daerah produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dan tetap memelihara kelestarian lingkungan masyarakat;
- 5) Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
- 6) Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerak perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerja sama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.2.2 Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Menurut Perda nomor 5 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035, Kabupaten Barito Utara masuk ke dalam daerah yang menjadi pengembangan daya tarik wisata di Provinsi Kalimantan Tengah menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:



**Tabel 4. Kawasan Strategis Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

No	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
1.	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan strategis Rumah Adat Betang;</li> <li>- Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pahewan Kalawa</li> <li>• Pahewan Kaluru</li> <li>• Pahewan Tabalie</li> </ul> </li> <li>- Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi umat hindu Kaharingan; dan</li> <li>- Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/ Kesultanan</li> </ul>	<p>Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangkaraya</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, <b>Kabupaten Barito Utara</b>, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangkaraya. Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
2	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</p> <p>a. Kawasan Strategis dan ekosistem nasional di Kalimantan Tengah berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Ekosistem Air Hitam;</li> <li>2. Kawasan Ekosistem Pantai (Mangrove); dan</li> <li>3. Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar.</li> </ol> <p>b. Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB)</p>	<p>Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Sepanjang jalur Pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Dataran bagian selatan wilayah provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, dan <b>Kabupaten Barito Utara</b></p>
3	<p>Kawasan Strategis Perindungan dan keanekaragaman hayati terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang</li> <li>b. Cagar Alam bukit Tangkiling</li> <li>c. Cagar Alam Pararawen I dan II</li> </ol>	<p>Kabupaten Murung Raya</p> <p>Kota Palangkaraya <b>Kabupaten Barito Utara</b></p>



No	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
	d. Suaka margasatwa Sungai Lamandau	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
	e. Taman Nasional Tanjung Puting	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan
	f. Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kelawa, Danau Sabuah	Kabupaten Pulang Pisau
	g. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang	Kabupaten Katingan
	h. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang	Kabupaten Kotawaringin Barat
	i. Konservasi Anggrek Hitam	Kabupaten Barito Timur
	j. Danau Sembuluh	Kabupaten Seruyan
	k. Danau Burung	Kabupaten Kotawaringin Timur
	l. Hutan Monumental nyaru menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, dan Danau Lewu	Kota Palangkaraya

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Sedangkan di RTRW Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013, Kabupaten Barito Utara juga telah masuk ke dalam daerah pengembangan daya tarik wisata di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam pengembangan transportasi udara, dilaksanakan dengan pengembangan fungsi bandar udara, meliputi : Bandara tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar di Pangkalanbun dan Bandara H Asan Sampit berfungsi sebagai Bandara Utama, selain mendukung pelayanan transportasi udara sekunder dan tersier, terutama melayani penerbangan antar daerah atau provinsi di Indonesia. Bandara Beringin di muara teweh, Bandara Sanggu di Buntok serta Bandara Perintis Kuala Pembuang, Bandara Perintis Kuala Kurun, Bandara Perintis Tumbang Samba dan Bandara perintis Indomuro berfungsi sebagai bandara pendukung (feeder)
2. Pasal 22 Menyatakan: Pengembangan prasarana air bersih dengan meningkatkan pelayanan pada pusat-pusat pemukiman yang berperan sebagai pusat kegiatan Nasional, Pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal terutama yang bersifat lintas kabupaten/kota.
3. Paragraf I Arahkan pengelolaan kawasan lindung pasal 25 : Kawasan Lindung di Provinsi terdiri dari :
  - a. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya
  - b. Kawasan Perlindungan Setempat
  - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
  - d. Kawasan Rawan Bencana Alam



4. Pasal 26 Menyatakan : Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat 1 terdiri dari :
- a. Kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
  - b. Kawasan Hutan Lindung Gambut, yaitu kawasan yang bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut yang dalam masa di tetapkan untuk di fungsikan sebagai kawasan hutan lindung;
  - c. Kawasan Resapan Air, yaitu kawasan dengan curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Penyebaran kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung gambut, dan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud berikut ini adalah:

- a. Kawasan Hutan Lindung, tersebar di kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan Kotawaringin Barat;
- b. Kawasan Hutan Lindung Gambut sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, tersebar di kabupaten kotawaringin Barat, Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan dan Kota Palangkaraya;
- c. Kawasan Resapan Air, tersebar di semua Kabupaten/kota, penetapannya di atur lebih lanjut dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyebaran kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung gambut, dan kawasan resapan air sebagaimana di maksud pada pasal ini adalah:

- d. Kawasan Hutan Lindung, tersebar di kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan Kotawaringin Barat;
- e. Kawasan Hutan Lindung Gambut sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, tersebar di kabupaten kotawaringin Barat, Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan dan Kota Palangkaraya;



- f. Kawasan Resapan Air, tersebar di semua Kabupaten/kota, penetapannya di atur lebih lanjut dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 28 Menyatakan : Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 3, mencakup :
- a. Kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Yiatu kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya dan atau mewakili formasi biodata tertentu serta mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan belum diganggu manusia;
  - b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairannya, yaitu Kawasan yang mewakili ekosistem khas laut maupun diperairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman biota laut yang ada;
  - c. Kawasan Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, di kelola dengan system zonasi yang di manfaatakn untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi;
  - d. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas;
  - e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.

Kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa seabgaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi :

- a. Cagar Alam Pararawen I dan Pararawen II Terletak di Kabupaten Barito Utara;
- b. Agar Alam Bukkit Tangkiling terletak di Kota Palangkaraya;
- c. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung terletak di Kabupaten Murung Raya;
- d. Cagar Alam Tumbang Tahai Tangkiling terletak di Kota Palangkaraya;
- e. Cagar Alam Air Terjun Molau Besar terletak di Kabupaten Barito Utara;
- f. Cagar Alam Bukit Bakitap terletak di Kabupaten Murung Raya;
- g. Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara.

Suaka Alam Laut dan perairannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Suaka Alam Luat Gosong Sanggora di Teluk Kumai Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.





- Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Taman Nasional Tanjung Puting, terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;
  - b. Taman Nasional Bukit Raya dan Bukit Baka Terletak di Kabupaten Katingan;
  - c. Taman Wisata Ait Terjun Poran terletak di Kabupaten Barito Utara;
  - d. Taman Wisata Bukit Tangkiling terletak di Kota Palangkaraya;
  - e. Taman Wisata Tanjung Keluang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - f. Taman Wisata Ujung Pandaran terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - g. Taman Wisata Liang Saragih terletak di Kabupaten Barito Timur.
6. Paragraf II Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 30 : Kawasan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :
- a. Kawasan Hutan Produksi yang terdiri dari :
    - Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - Kawasan Hutan Produksi;
  - b. Kawasan Pertanian yang terdiri atas :
    - Kawasan Pertanian Lahan Basah;
    - Kawasan Pertanian Lahan Kering;
    - Kawasan Pertambakan;
  - c. Kawasan Pertambangan.
  - d. Kawasan Industri.
  - e. Kawasan Pariwisata.
  - f. Kawasan Pemukiman.
7. Pasal 35 Menyatakan : Kawasan Pariwisata sebagaimana di maksud dalam pasal 30 angka 5 mencakup kawasan yang memiliki potensi besar untuk keperluan pariwisata di semua kabupaten dan Kota.
8. Paragraf 3 tentang Arahan pembangunan system Pusat-Pusat Pemukiman.
9. Pasal 37 Menyatakan : Sistem Pusat-Pusat Pemukiman di Provinsi Kalimantan Tengah di lihat dalam konteks wilayah provinsi serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional, mencakup :
- a. Kota Pangkalanbun Berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pelabuhan Laut dan Udara, Pusat Industri, Pusat Perdagangan dan Jasa.
  - b. Kota Sukamara Berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat industri dan pusat perdagangan dan Jasa.
10. Paragraf 4 tentang Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas.



11. Pasal 38 Menyatakan : Kawasan yang di prioritaskan pengembangannya adalah kawasan yang di tetapkan dengan kretaria sebagai berikut:
  - a. Kawasan Terpencil, terisolir, dan atau kawasan terbelakang kerena keterbatasan sumber daya;
  - b. Kawasan pemacu pertumbuhan wilayah sekitarnya;
  - c. Kawasan yang berperan menunjang perkembangan sector-sektor strategis;
  - d. Kawasan Kritis yang terutama berfungsi Lindung.
12. Kawasan yang diprioritaskan pengembangan atau pengelolaanya sebagaimana ayat (1) adalah :
  - a. Kawasan Pedesaan Terpencil, terisolir, dan terbelakang;
  - b. Kawasan Pedesaan di wilayah perbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
  - c. Kawasan Sentra Produksi Pertanian tanaman Pangan dan Holtikultura, perkebunan, perikanan, kehewananan dan kawasan Sentra Industri;
  - d. Kawasan Sekitar Jalur Jalan Lintas Kalimantan;
  - e. Kawasan Andalan Sampit dan Sekitarnya;
  - f. Kawasan Andalan Pangkalabun dan Sekitarnya;
  - g. Kawasan Andalan Muara Teweh dan Sekitarnya;
  - h. Kawasan Andalan Buntok dan Sekitarnya;
  - i. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dan Sekitarnya;
  - j. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (Kapet) DAS KAKAB;
  - k. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting;
  - l. Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka;
  - m. Suaka Alam Laut Gosong Sanggora di Teluk Kumai.

### **23. Kepariwisataaan Kabupaten Barito Utara dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah**

#### **2.3.1. Penetapan Kawasan Pariwisata Kabupaten Barito Utara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara**

Kawasan pariwisata menurut RTRW Kabupaten Barito Utara, meliputi

- 1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h, adalah obyek wisata yang terdapat di kecamatan Teweh Selatan seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar pada Area Penggunaan Lainnya (APL).
- 2) Potensi Pariwisata Lainnya terdiri atas :
  - a. Wisata alam, terdiri atas, cagar alam pararawen, waduk trinsing, kawasan gunung lumut, liang idai, air terjun inih, danau butong, jeram pemantu, balai warik dan janah gemuntur;



- b. Wisata kota, terdiri atas taman rekreasi remaja, taman stadion Muara Teweh dan bundaran kota;
  - c. Wisata cagar budaya, terdiri atas bangkai kapal onrust, rumah betang Teluk Malewai, rumah betang Tambau, rumah betang dambung sirang dan bekas benteng belanda; dan
  - d. Wisata ziarah, terdiri atas eks makam Pangeran Antasari, makam Panglima Batur, makam Mangkusari, makam anak Gusti Arsyad dan makam datuk.
- 3) Potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam rencana sektor pariwisata.

(1) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.

(2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:
  1. kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten;
  2. kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional;
  3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
  4. infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
  1. Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air;



2. kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional; dan
  3. kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional;
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
    1. kawasan food estate di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei;
    2. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat;
    3. kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten;
    4. kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten; dan
    5. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang;
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei;
  - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
    1. kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat;
    2. kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei; dan
    3. cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
  1. kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei;



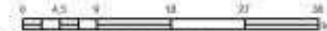
2. kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan; dan
  3. kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei;
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur; dan
  - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan;
- (5) Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (6) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
 Jln. Ahmad Yani No. 70 Telp. (0519) 21120 Fax. (0519) 22432  
 Muara Teweh

Lampiran IX

**PETA RENCANA KAWASAN**  
**STRATEGIS KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2011 s/d 2031**

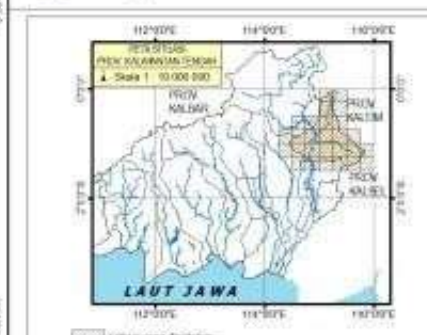


Skala 1 : 600.000

Proyeksi Universal Transverse Mercator  
 Sistem Garis Geopada dan Merid  
 Datum WGS 84  
 Zona 50S

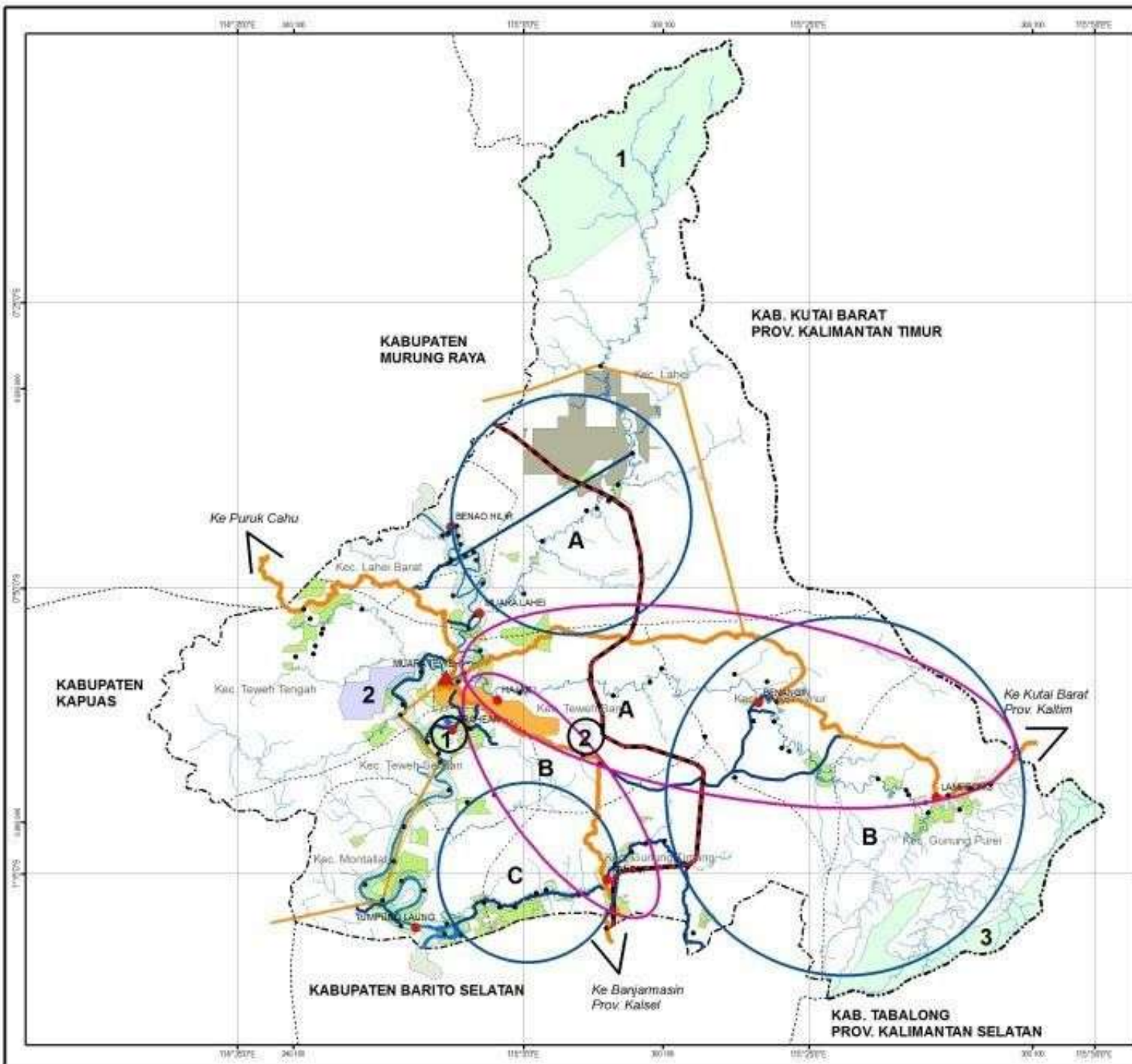
**LEGENDA :**

- |  |   |
|--|---|
| Ibukota Kabupaten                                | Kaw. Strategi Pengembangan Ekonomi                              |
| Bukala Kecamatan                                 | Kaw. Andalan Muara Teweh  |
| Desa   | DAS BARITO (KAPET DAS KAKAS)                                    |
| Batas Provinsi                                   | Kaw. Pertanian Tanaman Pangan<br>= 8.041,78 ha                  |
| Batas Kabupaten                                  | Cadangan Lahan Pertanian<br>(Jumlah 8 Kecamatan) = 35.001,78 ha |
| Batas Kecamatan                                  | Pengembangan Kota Muara Teweh                                   |
| Sungai   | Koridor Sub DAS Sungai Lahoi                                    |
| Rencana Transportasi                             | Koridor Sub DAS Sungai Teweh                                    |
| Kolektor Primer 1                                | Koridor Sub DAS Sungai Montalat                                 |
| Kolektor Primer 2                                | Koridor Jln. MTW-Malawakan-<br>Lampung-Bis. Kalim               |
| Lokal Primer                                     | Koridor Jln. Negara Sp. Lahoi -<br>MTW - Kandi                  |
| Rel Kereta Api                                   | Kaw. Triniting dan Tehean                                       |
| Kaw. Strategi Lingkungan,<br>Sosial dan Budaya   | Kaw. Hutan di Borneo dan<br>Ht. Tumbang Lutung                  |
| 1 Kaw. Hutan di Borneo dan<br>Ht. Tumbang Lutung | CA Perikanan  |
| 2 CA Perikanan                                   | Ht. Gunung Lemat  |
| 3 Ht. Gunung Lemat                               | Kaw. Strategi Sumbereksa Alam                                   |
| Kaw. Strategi Sumbereksa Alam                    | Kaw. Strategi Wadai   |
| Pertambangan Gas Bumi                            | Desa Skala (Renc. YONIF)  |



- Daftar Pustaka
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BUPATI BARITO UTARA,  
  
H. NADALSYAH



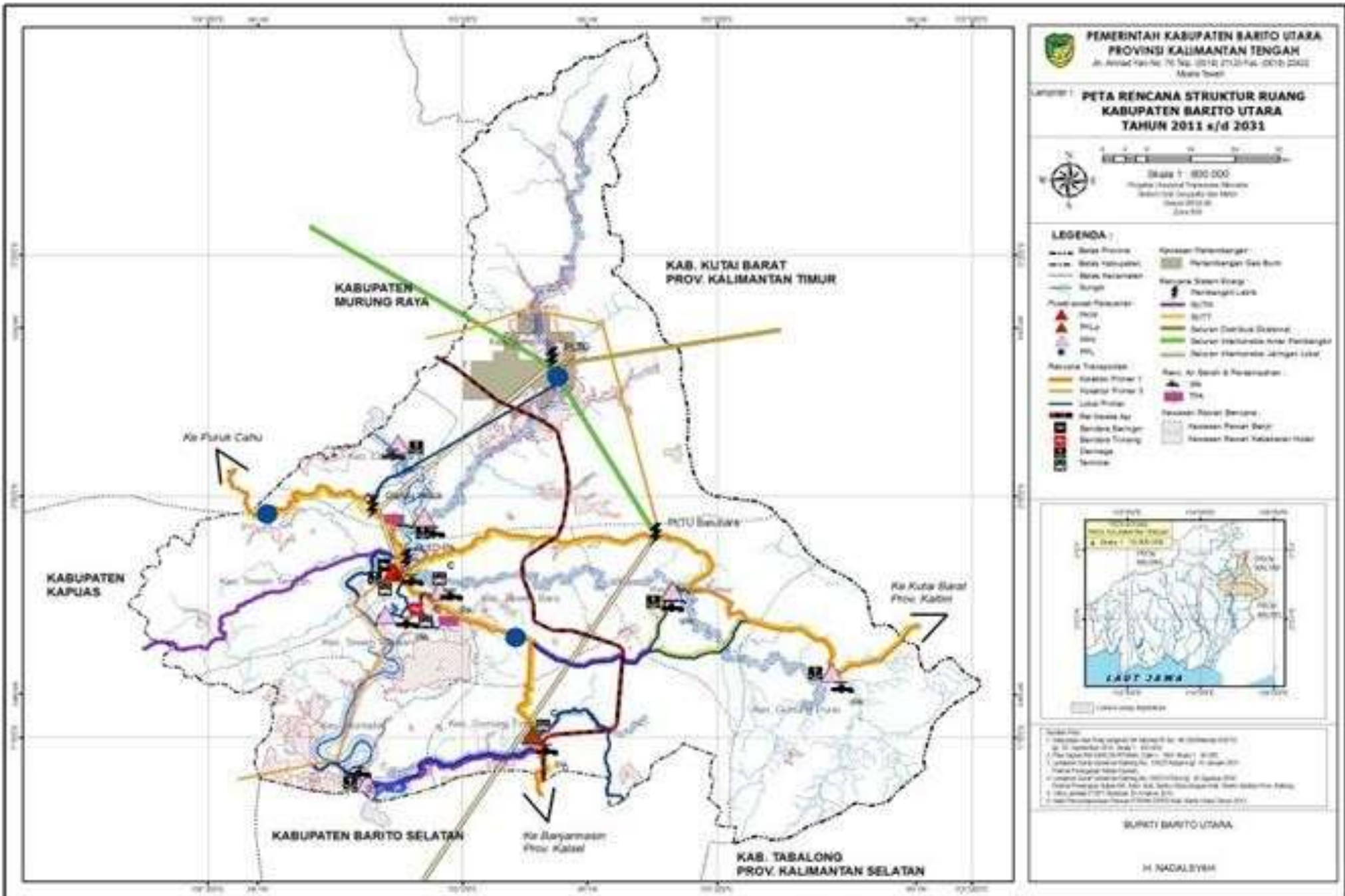
### 2.3.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Utara

#### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi :
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam gambar berikut.







**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
 Jl. Ahmad Yani No. 76, Tel. (0511) 2712141-27121242  
 Muara Tuar

**Lampiran 1**  
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2011 s/d 2031**

Scale 1 : 800 000  
 Rangka (Rencana) Struktur Ruang  
 Kabupaten Barito Utara  
 Tahun 2011 s/d 2031

- LEGENDA :**
- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Sungai</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ RTU</li> <li>▲ RTU</li> <li>▲ RTU</li> <li>▲ RTU</li> <li>▲ RTU</li> </ul> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Jalan Tol</li> <li>--- Jalan Primer 1</li> <li>--- Jalan Primer 2</li> <li>--- Jalan Primer 3</li> <li>--- Jalan Sekunder</li> <li>--- Jalan Tersier</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Perencanaan Gas Bumi</li> <li>--- Perencanaan Listrik</li> <li>--- RTU</li> <li>--- RTU</li> <li>--- Saluran Distribusi Gas</li> <li>--- Saluran Distribusi Air Perumahan</li> <li>--- Saluran Distribusi Jaringan Listrik</li> <li>--- Rasi Air Bersih &amp; Perumahan</li> <li>--- Rasi</li> <li>--- Rasi</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Perencanaan Rawat Kesehatan</li> <li>--- Perencanaan Rawat Gizi</li> <li>--- Perencanaan Rawat Rehabilitasi Sosial</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|



**DAFTAR PUSTAKA :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2007 tentang RTRR Kabupaten Barito Utara Tahun 2007-2012

**SURTI BARITO UTARA**  
 H. NADALIYEM



### 2.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara urusan pariwisata masuk dalam misi 4 dengan indikator keberhasilan yaitu persentase kunjungan wisata. Misi 4 RPJMD Kabupaten Barito Utara disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023**

Misi 4	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Kondisi Akhir 2023
Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	Meningkatnya daya saing pariwisata	Kunjungan wisata	%	79,0	99,8

Sumber: RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023

### 2.3.4. Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2017, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut adalah tabel capaian kinerja Dinas lima tahun terakhir.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara**

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan Wisata	6.000	10.000	20.000	30.000	40.000	6.000	40.460	43.773	34.730	42.199
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	100	100	100	100	-	68,21	14,82	12,65	22,36
3	Jumlah Grup Kesenian	4	10	16	21	31	4	16	16	16	16
4	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8	8	10	10	10	8	9	12	15	6
6	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
7	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	3	4	9	9	9	3	4	9	9	9

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kab. Barito Utara 2018-2023

Dilihat dari tabel di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara telah tercapai dengan baik, khususnya bidang kebudayaan dan bidang pengembangandestinas wisata, sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun pertama belum memenuhi target namun mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya meski pada tahun ke-empat kembali mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program destinasi pengembangan destinasi pariwisata.
- b. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah objek wisata pada dua tahun pertama belum dapat memenuhi target, namun meningkat pada tahun-tahun berikutnya, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program destinasi pengembangan destinasi pariwisata.
- c. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah promosi wisata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengembangan pemasaran pariwisata.
- d. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah sanggar seni dari tahun pertama mengalami peningkatan dari jumlah target hingga tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengelolaan keragaman budaya.
- e. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah pagelaran seni budaya mengalami peningkatan pada dua tahun pertama kemudian menurun pada tahun ketiga lalu kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengelolaan keragaman budaya.

Permasalahan utama pembangunan pariwisata Kabupaten Barito Utara yaitu:

1. Permasalahan di Bidang Pariwisata :

- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah,
- Belum maksimalnya promosi wisata daerah,

2. Permasalahan Di Bidang Kebudayaan :

- Belum maksimalnya pelestarian budaya lokal,
- Belum optimalnya pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan situs cagar



budaya,



Kabupaten Barito Utara memiliki potensi Sumber Daya Pariwisata dan kekayaan serta keragaman sosial budaya daerah yang sangat potensial yaitu :

- a. Wisata Alam, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata seperti panorama alam, pegunungan, danau, sungai, hutan, goa-goa, flora dan fauna.
- b. Wisata Budaya, yaitu pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata, kekayaan dan keragaman sosial budaya. Seperti suku Dayak di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai ciri khas tersendiri baik agama, adat istiadat, kebiasaan, seni budaya, upacara, ritual, situs, peninggalan purbakala, bahasa dan lainnya.
- c. Wisata Minat Khusus, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya untuk menimbulkan daya tarik khusus dan minat khusus sebagai sasaran wisata seperti olah raga panjat tebing, belanja, wisata ziarah dan lain-lain
- d. Wisata Sejarah, yaitu pemanfaatan peninggalan bukti-bukti sejarah terutama perang melawan penjajah.
- e. Agro Wisata, perkebunan kelapa sawit, buah-buahan dan lain-lain.

Dalam hal pengembangan pariwisata, beragam masalah yang dihadapi oleh pemerintah antara lain adalah sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, kurang optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, serta rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan. Investasi dalam hal wisata dapat berupa hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi atau peralatan, dan lain-lain. Dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan daerah diupayakan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mampu mendorong percepatan perolehan target pendapatan asli daerah.

Kebudayaan memiliki arti hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern. Begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas Kabupaten Barito Utara.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata yaitu :

**Tabel 7. Renstra Kementerian Pariwisata Nasional**

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata
2	Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
3	Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
4	Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kab. Barito Utara 2018-2023  
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yakni:

**Tabel 8. Renstra Dins Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Tujuan	Sasaran
1	Mendorong/fasilitasi perwujudan penataan obyek wisata unggulan di Kalimantan Tengah	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah
2	Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya	Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya
3	Meningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya
4	Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata	Meningkatnya kuantitas usaha Pariwisata
5	Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang berprestasi
6	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalteng	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng
7	Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul melibatkan masyarakat	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul
8	Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder	Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM insan Pariwisata	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Pariwisata
10	Meningkatkan kuliatas SDM insan Kebudayaan	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Kebudayaan

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kab. Barito Utara 2018-2023



Tabel 9. Matrik Komparasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Sasaran Rensta Disbudparpora Kab. Barito Utara	Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
1.	Persentase kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2.	Persentasi objek wisata yang dikembangkan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata
3.	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan pengembangan seni budaya daerah dalam rangka menguatkan budaya lokal	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
4.	Persentase group kesenian yang aktif		Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
5.	Persentase pelestarian situs dan benda cagar budaya		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kab. Barito Utara 2018-2023





### BAB III

## KONDISI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### 3.1. Kondisi Fisik

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Terletak pada posisi : 114°27'3,32" – 115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara serta 1°27'00" Lintang Selatan.

Batas Wilayah Kabupaten Barito Utara meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

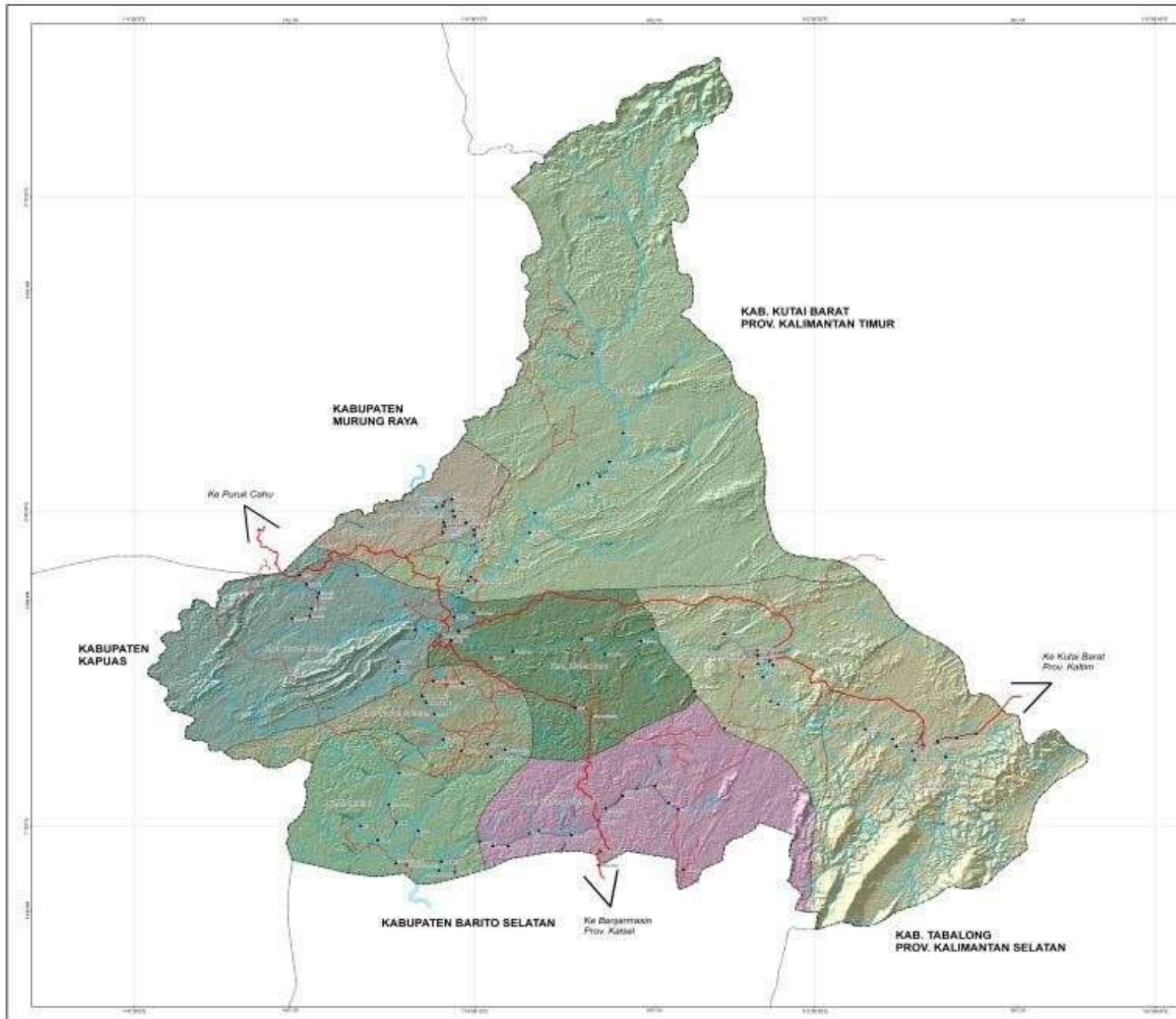
Secara Administratif, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 10 Kelurahan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Barito Utara lebih kurang 8.300 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 10. Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Montallat	553,00	6,66
2	Gunung Timang	890,00	10,72
3	Gunung Purei	1.468,00	17,69
4	Teweh Timur	592,22	7,14
5	Teweh Tengah	585,36	7,05
6	Teweh Baru	812,78	9,79
7	Teweh Selatan	485,64	5,85
8	Lahei	1.618,48	19,50
9	Lahei Barat	1.294,52	15,60
Total		8.300,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 1.655,00 km<sup>2</sup> atau 19,94% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.468,00 km<sup>2</sup> atau 17,69% dari luas Kabupaten Barito Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Teweh Selatan yaitu hanya 485,64 km<sup>2</sup> atau 5,85 % dari luas Kabupaten Barito Utara.




**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
 Jl. A. Yani No. 78 Telp. (0511) 21100 Fax. (0511) 23403, 21108 Muara Teweh  
 Email: [info@baritoutara.go.id](mailto:info@baritoutara.go.id) Website: [www.baritoutara.go.id](http://www.baritoutara.go.id)

**WILAYAH ADMINISTRASI**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

  
 Skala 1 : 200.000  
 Proyeksi Universal Transverse Mercator  
 Sistem Koordinat Geografis dan Meter  
 Datum WGS 84  
 Zona 52E

**LEGENDA :**

 Batas Kabupaten	 Kct. Murung Raya = 098,02 km <sup>2</sup>
 Batas Kecamatan	 Kct. Gunung Tinggi = 1.183,71 km <sup>2</sup>
 Sungai	 Kct. Laha Baru = 311,84 km <sup>2</sup>
 Batas Provinsi	 Kct. Seleh Baru = 827,90 km <sup>2</sup>
 Batas Kabupaten	 Kct. Gunung Panai = 1.487,12 km <sup>2</sup>
 Batas Kecamatan	<b>Nilai Elevasi:</b>
 Jalan Nasional	 1000 - 200
 Jalan Kabupaten	 0

**Wilayah Kecamatan:**

 Kct. Seleh Tinggi = 1.124,07 km <sup>2</sup>
 Kct. Laha = 3.180,98 km <sup>2</sup>
 Kct. Seleh Baru = 824,98 km <sup>2</sup>
 Kct. Seleh Selatan = 478,42 km <sup>2</sup>



**Sumber Data:**

1. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia (RUBI) 1:100.000, Skala 1 : 100.000
2. Laporan Hasil Survei Hidrografi, Tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Januari 2011
3. Laporan Hasil Survei Hidrografi, Tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Januari 2011
4. Data Lintasi & R/B, Hasil Survei Hidrografi, 2011
5. Data Hidrografi 2011, Hasil Survei Hidrografi, 2011

**Disusun oleh:**  
 NISWA, Jl. Sultan Syarif Qudus Saifuddin Syah No. 70, 70114 Pekanbaru, Riau  
 Website: [www.niswa.com](http://www.niswa.com) Email: [info@niswa.com](mailto:info@niswa.com)

**BIPATI BARITO UTARA,**  
  
**B. WADALISAH**



### 3.1.1. Demografi Penduduk Kabupaten Barito Utara

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2017 sebesar 129.287 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari penduduk laki-laki, yaitu 48,04 persen perempuan dan 51,96 persen laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Barito Utara tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 16 orang per/km<sup>2</sup>.

**Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio	Jumlah Rumah Tangga
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Montallat	5.822	5.458	11.280	107	2.808
2	Gunung Timang	5.485	5.109	10.594	107	2.699
3	Gunung Purei	1.333	1.229	2.562	108	756
4	Teweh Timur	3.206	2.915	6.121	110	1.528
5	Teweh Tengah	23.035	21.814	44.849	106	11.162
6	Teweh Baru	9.304	8.578	17.882	108	4.349
7	Teweh Selatan	7.265	6.180	13.445	118	3.572
8	Lahei	6.496	5.960	12.456	109	3.196
9	Lahei Barat	5.233	4.865	10.098	108	2.311
Total		67.179	62.108	129.287	108	32.381

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Pada tahun 2017, dari seluruh penduduk Barito Utara yang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis, sebagian besar bekerja di sektor pertanian (42,94 persen), sedangkan sektor yang paling sedikit penyerapannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

**Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Barito Utara**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	17.850	8.084	25.934
2	4.155	306	4.461
3	1.622	1.408	3.030
4	346	-	346
5	2.693	-	2.693
6	3.326	6.203	9.529
7	1.223	312	1.535
8	849	588	1.437
9	5.831	5.604	11.435
Jumlah/Total	37.895	22.505	60.400

Keterangan:

- 1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 Pertambangan dan Penggalian
- 3 Industri Pengolahan
- 4 Listrik, Gas, dan Air
- 5 Bangunan
- 6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- 7 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan



**Tabel 13. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2016-2017
		2016	2017	
1	Montallat	11.202	11.280	0,7
2	Gunung Timang	10.531	10.594	0,6
3	Gunung Purei	2.547	2.562	0,59
4	Teweh Timur	6.085	6.121	0,59
5	Teweh Tengah	44.519	44.849	0,74
6	Lahei	17.750	17.882	0,74
7	Teweh Baru	13.346	13.445	0,74
8	Teweh Selatan	12.382	12.456	0,6
9	Lahei Barat	10.038	10.098	0,6
	Total	128.400	129.287	0,69

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 mencapai 129.287 jiwa yang terdiri dari 67.179 penduduk laki-laki atau 51,96 persen dan 62.108 penduduk perempuan atau 48,04 persen, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 berjumlah 128.400 jiwa (66.715 laki-laki dan 61.685 perempuan). Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dari angka sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Sex ratio pada tahun 2017 sebesar 108 yang berarti bahwa terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Pada tahun 2017 terjadi bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain. Akibatnya sumber daya manusia usia 15-64 tahun akan melimpah di Kabupaten Barito Utara. Sehingga berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu sekitar 68,01 persen dari jumlah seluruh penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Barito Utara.

**Tabel 14. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Barito Utara**

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-13	15-63	65+	
Laki-laki	28,31	68,49	3,20	100
Perempuan	29,24	67,49	3,27	100
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	76,74	18,43	4,84	100
SD dan Sederajat	11,52	84,67	3,81	100
SMP dan sederajat		98,11	NA	100
SMA keatas	-	98,65	NA	100
	<b>28,76</b>	<b>68,01</b>	<b>3,23</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018



### 3.1.2. Topografi

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km<sup>2</sup> (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km<sup>2</sup> (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km<sup>2</sup> (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km<sup>2</sup> (25%).

### 3.1.3. Jenis Tanah

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

### 3.1.4. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4°C sampai dengan 33,5°C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm<sup>3</sup> dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen. Berdasarkan data pengamatan Station Meteorologi Beringin Muara Teweh pada tahun 2017, keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 33,1°C dan minimum kurang lebih 31,8°C (keadaan bulan Januari sampai dengan Desember 2017) dengan kelembaban nisbi rata-rata 84,8 persen. Sedangkan curah hujan dan hari hujan pada tahun 2017, curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan September 2017 yaitu 80 dan 55 mm<sup>3</sup> dengan hari hujan 15 dan 12 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi pada tahun 2017 yaitu bulan November yaitu 631 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 28 hari.

### 3.1.5. Hidrologi

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 Km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.



### 3.2. Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata

Sejarah Kabupaten Barito Utara sebagai wilayah yang telah lama berkembang dan terdapat pada posisi yang strategis. Kabupaten Barito Utara memiliki beberapa catatan sejarah yang memiliki motto daerah “Iya Mulik Bengkang Turan”. Sejarah telah membuktikan bahwa Wilayah Barito Utara telah tercatat keberadaannya lebih dari 7 (tujuh) abad yang lalu, yang disebut-sebut dalam naskah NAGARA KERTAGAMA maha karya EMPU PRAPANCA pada tahun 1365 Masehi. Nama Barito dalam naskah tersebut disebut dalam sebuah sungai besar dengan kawasan pemukiman penduduk yang bermukim disepanjang karidor Sungai Barito. Sejarah lainnya juga tercatat dalam hikayat banjar yang tersimpan di Perpustakaan British of London, dalam hikayat tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 1400 Masehi rakyat dari beberapa daerah di Kalimantan termasuk kawasan Barito turut menyampaikan selamat kepada Pangeran Suriyata dari Kerajaan Majapahit selaku raja banjar yang pertama. Hikayat Banjar lainnya adalah pada tahun 1526 Masehi tentang pengumuman Patih Bandarmasih di Banjarmasin keberbagai daerah termasuk Kawasan Barito tentang Pangeran Samudera sebagai raja Banjar. Catatan sejarah keberadaan Wilayah Barito juga terdapat pada masa pengembangan Agama Kristen yaitu dari keterangan Eisenburger tahun 1963, kisah ekspedisi Rohanian Portugis Peter Vantimaglia tahun 1590 Masehi dan kisah ekspedisi pegawai kompeni Belanda F.J Pelda Hartman pada tahun 1792 Masehi.

Sejarah terbentuknya Wilayah Barito Utara sangat dipengaruhi perkembangan sejarah Kerajaan Banjar. Kemunduran Kerajaan Banjar di mulai dengan adanya perjanjian tanggal 2 Januari 1817, yang mana bendera Sultan Banjar diganti dengan Bendera Belanda yang juga menandakan pengalihan kekuasaan dan pemerintahan kepada pemerintah Belanda. Pengalihan kekuasaan tersebut mengakibatkan terjadinya perlawanan-perlawanan menentang Pemerintah Belanda, yaitu Perlawanan rakyat bakumpai yang dipimpin oleh pembekal Kendet pada tahun 1825 Masehi yang mengalami kekalahan, selain itu juga terjadi beberapa perlawanan di wilayah Barito Utara, yaitu Perang Banjar I tahun 1859 Masehi yang berdampak pada munculnya perlawanan penduduk Barito Utara yang pertama kalinya pada tanggal 26 Desember 1859, pada saat itulah kapal perang ONRUST dengan setengah Kompi Marinir dibawah pimpinan kapten Van Der Velde 42 orang awak kapal dibinasakan pejuang rakyat di Luntung Tuwur, setelah itu pihak Belanda melakukan serangan balasan pada tanggal 9 Februari 1860 yang mengakibatkan Lewu Lutung Tuwur digempur dan mengakibatkan 4 (empat) orang pejuang gugur. Selain itu juga terdapat beberapa perlawanan rakyat setelah tanggal 11 juni 1860 yang dipimpin langsung oleh Pengeran Antasari, dibantu Tumenggung Surapati,



Tumenggung Marta Lahew dan Tamunggung Roepa di Daerah Gunung Tongka, Tanjung Ruang antara desa Rarawa dan Malugai dalam sungai Montallat.

Serangan dan perlawanan juga terjadi pasca Kemerdekaan, yang mana Belanda mengulangi serangan pada tanggal 22 Februari 1949 dengan tambahan Kapal Perang dan KNIL. Pada serangan itu kapal perang belanda SURINAME mengalami kerusakan berat dan 70 awak kapal gugur. Dari pihak pejuang rakyat juga gugur 4 (empat) orang. Selain itu juga banyak terbentuk berbagai gerakan perlawanan terhadap Belanda dalam berbagai kesatuan, diantaranya pada tanggal 12 Oktober 1949 dibentuk MN 001 MTKI yang dipimpin oleh mayor Koestam Alwi, pada tanggal 1 November 1949 dibentuk Devisi Lambung Mangkurat/TNI-AD dipimpin oleh Letkol Hasan Basry, pada tanggal 13 Desember 1949 dibentuk GRRI yang dipimpin oleh Letda P.K Sawong dan pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuk TTK (Tentara dan Teritorium Kalimantan yang dipimpin oleh Panglima Letkol Soekanda Bratamenggala, yang terbagi dalam 4 STM (Sub Tetirorium Meliter). STM 1 dipimpin oleh Letkol Hasan Basry, STM II dipimpin oleh Kapten Moelyono serta STM III dan STM IV.

Terbentuknya Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Otonom tidak lepas dari upaya pemerintah Republik Indonesia mendapatkan status *de facto et de jure*. Dalam upaya mengembalikan wilayah-wilayah bekas negara-negara bagian buatan Belanda kedalam wilayah Hukum Republik Indonesia, melalui surat keputusan tanggal 4 April 1950 nomor 133/S/9, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan status daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara sebagai Negara Bagian RIS dan langsung masuk kedalam status *de facto et de jure* Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Setelah itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 dengan surat keputusan tanggal 29 juni 1950 No. 0.17/15/3, menetapkan daerah-daerah di Kalimantan yang sudah bergabung dalam wilayah Republik Indonesia dengan Administrasi Pemerintahan terbagi dalam 5 wilayah Daerah Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Banjar Berkedudukan di Martapura.
2. Kabupaten Hulu Sungai berkedudukan di Kandangan.
3. Kabupaten Kota Baru berkedudukan di Kota Baru.
4. Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh.
5. Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit.

Selain 5 (lima) Kabupaten tersebut, pemerintah juga menetapkan wilayah Daerah Swapraja, Yaitu Kutai, Berau dan Bulungan yang masing-masing berkedudukan di Samarinda, Berau dan Bulungan. Dalam melaksanakan ketetapan tersebut, Gubernur Kalimantan saat itu, menindak lanjuti dengan SK Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus



1950 Nomor 154/OPB/92/04, namun prosesnya baru terlaksana setelah Negara Federal RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu melalui SK Mendagri tanggal 27 april 1951 Nomor 115.7/4/28 George Obos diangkat menjadi Bupati Barito yang pertama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di ketuai oleh C.Luran. Seiring pembangunan di Barito Utara, Melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Dati II Barito di pisah menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Dati II Barito Utara dan Kabupaten Dati II Barito Selatan.

Pada awal pembentukan sebagai Kabupaten Dati II Barito terbagi dalam 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Murung, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Lahei, Kecamatan Montallat dan Kecamatan Teweh Timur. Setelah menjadi Kabupaten Dati II Barito Utara sebagai daerah Otonom juga membawahi Kabupaten Wilayah Administrasi (Kabad) Murung Raya dengan ibukotanya Puruk Cahu, yang secara terseluruhan terbagi dalam 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Murung, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Montallat, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei.

Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan dan untuk memberikan hak, kewenangan dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, maka ditetapkan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan Implikasi terhadap perkembangan di daerah diantaranya adalah adanya pemekaran daerah-daerah provinsi kalimantan Tengah di mekarkan menjadi 14 (empat belas) Kabupaten/kota melalui undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katengan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, yang mana Kabupaten Dati II Barito Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Seiring dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan yang lebih otonomis sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pemekaran Kabupaten, sempat dengan saat ini Wilayah Kabupaten Barito Utara dengan luas 830.000 Ha terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Montallat, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei.





### 3.3. Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata

Kekayaan ekologis yang berpotensi sebagai ekowisata yaitu Cagar alam Gunung Pararawen yang juga termasuk dalam Kawasan Heart of Borneo (HoB). Kawasan konservasi seperti taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa dan cagar alam merupakan habitat alami dari berbagai jenis flora dan fauna. Cagar Alam Pararawen merupakan kawasan konservasi yang secara administratif terletak di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis kawasan tersebut berada pada 114<sup>o</sup>44' - 114<sup>o</sup>50' BT dan 0<sup>o</sup>37' - 01<sup>o</sup>02'LS. Selain potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, kawasan ini juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan, daerah resapan air bagi kawasan disekitarnya dan beberapa anak sungai dan sungai penting di Kabupaten Barito Utara maupun wilayah hilirnya serta sebagai sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan kepentingan lainnya. Cagar Alam Pararawen juga memiliki potensi ekowisata (ecotourism) dan berbagai jasa lingkungan (Environmental services) lainnya, penghasil hasil hutan non kayu seperti tumbuhan obat, rotan dan lain-lain serta sebagai lokasi penelitian dan pendidikan.

Fungsi Cagar Alam Pararawen sebagai cagar alam baik langsung maupun tidak langsung terhadap aspek ekologi, ekonomi dan juga sosial sangat ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi, potensi dan atribut floristik maupun parameter lingkungan lainnya yang ada dalam kawasan tersebut. Peranan Cagar Alam Pararawen bagi kelanjutan ekosistem hutan belum banyak dieksplorasi dan dikaji secara mendalam.

Cagar Alam Pararawen merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan konservasi dengan suasana hutan hujan tropis yang masih asli dan posisi geografisnya yang berbukit bukit, merupakan suatu kawasan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Selain sebagai pengatur tata air dan mencegah bencana longsor, keindahan dan kekhasan flora yang ada di kawasan tersebut merupakan salah satu potensi keanekaragaman hayati yang harus dilestarikan. Salah satu potensi flora yang ada yaitu keragaman keluarga orchidaceae (anggrek) yang merupakan daya tarik kawasan. Kawasan hutan Cagar Alam Pararawen yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan darat dari kota Palangkaraya merupakan habitat puluhan jenis anggrek.

Dalam upaya konservasi jenis tumbuhan yang diharapkan dapat melestarikan tumbuhan yang ada, demonstrasi plot tumbuhan anggrek (demplot anggrek) di dusun Pararawen atau tepatnya di Resort Pararawen I. Demplot tumbuhan anggrek diharapkan dapat menjadi miniatur kawasan hutan yang berisikan beberapa jenis anggrek alam serta untuk mengenalkan jenis-jenis anggrek yang ada di kawasan Cagar Alam Pararawen kepada masyarakat tanpa harus masuk ke dalam kawasan. Demplot anggrek di Resort



Pararawen I dibuat sedemikian rupa sealami mungkin dengan menanam anggrek pada pohon induk/inang ataupun langsung di tanah selain itu beberapa batang anggrek ditanam di dalam pot kemudian diletakkan pada rak display dan digantung sebagai display bagi pengunjung yang ingin melihat jenis anggrek lebih dekat. Pagar dan papan informasi juga dibuat sebagai penanda lokasi demplot anggrek.

Keindahan, keanekaragaman, dan keunikan jenis anggrek endemik Kalteng membuat kesan keindahan tersendiri yang sangat menawan dipandang mata, Anggrek memiliki nilai potensi yang sangat tinggi karena merupakan lambang identitas. Karena potensi yang besar ini maka juga sekaligus sebagai tantangan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan-nya. Aset kekayaan genetik ini mampu memberi nilai ekologis tinggi apabila dilestarikan dengan baik.

Selain daerah pegunungan, kekayaan ekologis Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barito Utara sangat memegang peranan penting, khususnya pada daerah yang berbasis utama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan anak sungainya. Wilayah Kabupaten Barito Utara dialiri oleh Daerah Aliran Sungai Barito memanjang dari Hulu Barito dan ke hilir yang sejalur dengan Kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 Km dan lebar aliran sungai kurang lebih 650 m dengan kedalaman mencapai kurang lebih 8 m, bermuara ke Laut Jawa. Selain itu juga terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke sungai Barito, antara lain :

- Anak Sungai Montallat dengan panjang kurang lebih 11,25 Km dan lebar 68 meter dengan kedalaman 4-5 meter.
- Anak Sungai Teweh dengan panjang kurang lebih 87,50 Km dan lebar 84 meter dengan kedalaman 4-5 meter.
- Anak Sungai Lahei dengan panjang kurang lebih 77,50 Km dan lebar 90 meter dengan kedalaman 5-6 meter.

Di Kabupaten Barito Utara terdapat juga danau yang berada di sekitar Desa Butong. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke Utara.

### **3.4. Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata**

Suku asli masyarakat Kabupaten Barito Utara yakni merupakan Suku Dayak Taboyan atau disebut juga Dayak Tawoyan dan Dayak Maanyan. Secara umum, Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik bidang Politik, Ekonomi, Sosial, maupun Budaya, sehingga berbagai perkembangan hampir terjadi disemua sektor. Muara Teweh merupakan ibu kota Kabupaten Barito Utara yaitu sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan.



Bentuknya memanjang mengikuti aliran sungai, dan merupakan satu-satunya kota “ramai” didaerah pedalaman Sungai Barito, yang membelah Pulau Kalimantan dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan hingga Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah.

Saat ini pembangunan wilayah Kabupaten Barito Utara mengusung konsep *water front city* untuk mendukung pariwisata di sepanjang sungai Barito dan mengubah perilaku masyarakat untuk membuang sampah di sungai sehingga akan menciptakan lingkungan yang bersih dan indah untuk dijadikan wisata tepian sungai.



**Gambar 2. Sungai Barito Kabupaten Barito Utara**

Nama Muara Teweh berasal dari bahasa Banjar Kuala, muara : sedangkan dalam Banjar Hulu, Muara disebut “muhara”. Dalam komunitas Suku Bayan Dalam komunitas Suku Bayan Dusun Pepas, disebut Nangei Tiwei (Nangei = Tumbang, Muara; Tiwei = Ikan Seluang Tiwei). Pada komunikasi Suku Bayan Bintang Ninggi, disebut Nangei Musini (Nangei Musini = Muara Musini). Pada Komunitas Suku Dusun Taboyan Malawaken, disebut Ulung Tiwei (Ulung Tiwei = Muara Tiwei, di mana Ulung Tiwei ini merupakan rumpun bahasa sebelah Timur/Mahakam. Misalnya, Ulung Ngiram disingkat Long Ngiram, jadi Ulung Tiwei disingkat Long Tiwei) yang kemudian oleh kolonial Belanda dimelayukan menjadi Muara Teweh. Pada komunitas Dayak Tewoyan di kec. Teweh Timur, kec.Gunung Purei, Oleng Tiwei (Muara Teweh). Dan kabupaten ini memiliki semboyan adalah "Iya Mulik Bengkang Turan".

Pesta adat dan budaya yang terdapat di Barito Utara banyak dan beragam, namun hingga tahun 2017 semua kegiatan adat dan budaya tersebut belum terkoordinasi dalam satu agenda/jadwal kegiatan budaya karena pelaksanaan sangat tergantung dengan jadwal upacara adat yang tidak selalu sama setiap tahun Kegiatan tersebut antara lain; Festival Budaya Iya Mulik bengkang Turan (IMBT), Upacara Adat Wara, Acara Ba’Ayun setoiap bulan Maulid, Upacara Tandak Intan Hindu Kaharingan. Salah satu even yang



dilaksanakan yaitu Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan yang setiap tahun secara rutin diadakan, merupakan sebuah even untuk menggali, memasyarakatkan, mengembangkan, serta melestarikan seni budaya tradisional yang di miliki Kabupaten Barito Utara dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, dan budaya daerah. Kekayaan khasanah seni budaya tradisional tersebut dapat menjadi suatu kebanggaan dan potensi yang mendukung pembentukan etika, budaya, dan moral masyarakat Barito Utara. Kebanggaan dan kecintaan terhadap seni budaya tradisional akan memupuk dan memelihara sikap nasionalisme yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

Pada tahun 2017 Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan pertandingkan 13 cabang lomba tersebut yakni tari pesisir pedalaman, vokal lagu daerah Barito Utara putra dan putri, karungut putra dan putri, balogo, bagasing, manyipet putra dan putri, mangaruhi, basei kambe putra dan putri, jukung tradisional putra dan putri, sepak sawut, manetek, maneweng, dan manyila kayu, serta fotografi. Diharapkan ajang festival ini akan melahirkan atlet olahraga tradisional dan seniman yang akan mewakili Kabupaten Barito Utara pada Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

### 3.5. Perekonomian Barito Utara

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk mengetahui indikator kinerja makro Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15. Kondisi Makro ekonomi Kabupaten Barito Utara**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Petumbuhan Ekonomi	7,04	4,2	5,29	5,48	6,01
2	Inflasi					
	Inflasi Kota Palangkaraya	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11
	Inflasi Kota Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29
3	PDRB Perkapita					
	ADHB (juta Rp.)	47.921,40	49.793,90	52.621,10	57.310,70	63.938,70
	ADHK (ribu Rp.)	41.397,00	42.771,70	44.686,10	46.795,70	49.266,80
4	Indeks Gini	0,289	0,333	0,34	0,314	0,317
5	Persentase Penduduk Miskin	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
6	Indeks Pembangunan Manusia	65,12	66,3	67,38	68,28	69,07

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018



Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 8,3 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,9 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 7,4 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 6,0 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 6,4 triliun rupiah di tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017, Barito Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,01 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Barito Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Utara pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 43,51 persen (angka ini menurun dari 50,63 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,51 persen (naik dari 10,92 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,20 persen (naik dari 6,87 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 6,14 persen (naik dari 4,68 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,71 persen (naik dari 4,95 persen di tahun 2013).



**Tabel 16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	656.115,70	10,92	742.420,50	11,79	833.540,10	12,43	896.906,20	12,19	951.365,30	11,51
2	Pertambangan dan Penggalian	3.043.332,90	50,63	2.923.510,10	46,42	2.811.331,70	41,91	3.091.374,50	42,01	3.597.111,44	43,51
3	Industri Pengolahan	413.019,90	6,87	487.596,30	7,74	569.015,20	8,48	625.176,00	8,5	677.509,50	8,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	880,3	0,01	1.266,10	0,02	2.031,80	0,03	2.317,10	0,03	2.859,50	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.202,00	0,12	8.598,80	0,14	10.152,70	0,15	11.124,50	0,15	11.998,40	0,15
6	Konstruksi	281.693,90	4,69	316.839,60	5,03	373.755,00	5,57	399.558,80	5,43	432.052,30	5,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	281.373,30	4,68	332.147,70	5,27	386.262,70	5,76	444.551,00	6,04	507.514,20	6,14
8	Transportasi dan Pergudangan	297.347,80	4,95	334.623,10	5,31	387.921,20	5,78	424.146,10	5,76	472.086,80	5,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73.849,10	1,23	84.500,30	1,34	99.545,00	1,48	115.630,60	1,57	128.070,60	1,55
10	Informasi dan Komunikasi	59.472,00	0,99	64.956,50	1,03	72.331,20	1,08	79.112,80	1,76	86.609,40	1,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	100.920,30	1,68	112.109,30	1,78	121.032,60	1,8	129.619,00	1,76	140.697,10	1,7
12	Real Estate	86.784,10	1,44	96.096,10	1,53	109.435,40	1,63	119.568,20	1,62	131.985,80	1,6
13	Jasa Perusahaan	674,2	0,01	746,9	0,01	836,5	0,01	929,7	0,01	1.020,00	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.352,10	4,66	312.267,10	4,96	373.916,00	5,57	389.060,60	5,29	429.267,30	5,19
15	Jasa Pendidikan	246.661,60	4,14	275.135,80	4,37	318.911,80	4,75	359.606,20	4,89	395.532,70	4,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.005,70	1,8	125.009,80	1,98	146.911,90	2,19	164.881,00	2,24	183.006,40	2,21
17	Jasa lainnya	71.238,40	1,19	80.807,80	1,28	91.156,10	1,36	105.130,70	1,43	117.757,40	1,42
<b>PDR B</b>		<b>6.010.923,40</b>	<b>100</b>	<b>6.298.631,70</b>	<b>100</b>	<b>6.708.086,80</b>	<b>100</b>	<b>7.358.692,90</b>	<b>100</b>	<b>8.266.444,00</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh



lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,4 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6,0 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,48 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,07 persen. Salah satu penyebabnya adalah listrik masuk desa seperti di Kecamatan Gunung Timang khususnya Desa Ketapang, Walur, Rarawa, Baliti, Majangkan dan Kandui kini telah menikmati listrik dari PLN secara 24 jam. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,54 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,06 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,94 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 6,78 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,72 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,40 persen, serta lapangan Jasa Perusahaan sebesar 6,40 persen.

Sementara itu, tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,83 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,52 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,44 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan tercatat sebesar 5,14 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,56 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,36 persen, serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,16 persen.

**Tabel 17. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	542.486,00	2,45	571.550,30	5,36	603.763,90	5,64	624.365,10	3,41	645.353,60	3,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2.723.290,90	9,13	2.765.326,50	1,54	2.867.876,80	3,71	3.044.901,20	6,17	3.239.925,40	6,4



3	Industri Pengolahan	352.187,00	4,14	379.467,80	7,75	403.760,60	6,4	417.553,80	3,42	439.032,20	5,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.572,40	38,9	1.699,20	8,06	1.911,90	12,52	2.169,30	13,46	2.431,10	12,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.658,60	5,51	6.888,40	3,45	7.426,20	7,81	7.892,50	6,28	8.142,20	3,16
6	Konstruksi	233.462,50	5,64	245.787,90	5,28	264.078,60	7,44	276.358,20	4,65	291.395,50	5,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	251.169,00	5,51	275.118,60	3,45	292.768,20	7,81	312.158,70	6,28	333.830,60	3,16
8	Transportasi dan Pergudangan	251.863,40	4,07	268.738,30	6,7	87.081,50	6,83	304.548,50	6,08	327.515,50	7,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60.180,50	5,23	65.098,20	8,17	70.702,60	8,61	76.288,10	7,9	82.817,60	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	58.658,60	9,32	62.218,50	6,07	67.362,80	8,27	71.647,10	6,36	75.825,90	5,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	77.669,10	10,32	84.661,40	9	88.439,70	4,46	93.758,90	6,01	98.933,90	5,52
12	Real Estate	69.582,90	6,36	74.396,10	6,92	79.074,10	6,29	83.790,50	5,96	89.470,90	6,78
13	Jasa Perusahaan	551,6	8,03	580,2	5,18	620,7	6,97	658,7	6,13	700,9	6,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	220.309,20	6,07	237.850,00	7,96	262.837,60	10,51	267.809,30	1,89	280.033,90	4,56
15	Jasa Pendidikan	195.456,40	4,4	213.904,70	9,44	228.454,60	6,8	242.641,70	6,21	258.940,70	6,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.319,30	6,71	94.871,20	5,04	102.862,30	8,42	109.620,40	6,57	117.692,50	7,36
17	Jasa lainnya	57.133,70	5,08	62.221,20	8,9	67.512,60	8,5	72.407,20	7,25	77.519,00	7,06
	<b>PDR B</b>	<b>5.192.551,00</b>	<b>7,04</b>	<b>5.410.378,50</b>	<b>4,2</b>	<b>5.696.534,60</b>	<b>5,29</b>	<b>6.008.569,30</b>	<b>5,48</b>	<b>6.369.561,20</b>	<b>6,01</b>

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar daerah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan yang berdampak pada peningkatan transportasi. Selain itu, ada juga pembangunan jembatan seperti pembangunan jembatan Sei Benao dan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah, Pembangunan Islamic Center serta pembangunan fasilitas penunjang perekonomian lainnya seperti Pasar Dermaga, RSUD Muara Teweh serta Rumah Jabatan Bupati. Ekspor luar daerah yang dimaksud utamanya ekspor ke luar kabupaten yang didominasi oleh pertambangan batubara serta hasil pertanian seperti getah karet, sawit serta jagung.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah diabaikan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB di





Kabupaten Barito Utara selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,92	2,45	11,79	5,36	12,43	5,64	12,19	3,41	11,51	3,36
2	Pertambangan dan Penggalian	50,63	9,13	46,42	1,54	41,91	3,71	42,01	6,17	43,51	6,4
3	Industri Pengolahan	6,87	4,14	7,74	7,75	8,48	6,4	8,5	3,42	8,2	5,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	38,9	0,02	8,06	0,03	12,52	0,03	13,46	0,03	12,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	5,51	0,14	3,45	0,15	7,81	0,15	6,28	0,15	3,16
6	Konstruksi	4,69	5,64	5,03	5,28	5,57	7,44	5,43	4,65	5,23	5,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,68	5,51	5,27	3,45	5,76	7,81	6,04	6,28	6,14	3,16
8	Transportasi dan Pergudangan	4,95	4,07	5,31	6,7	5,78	6,83	5,76	6,08	5,71	7,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	5,23	1,34	8,17	1,48	8,61	1,57	7,9	1,55	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	9,32	1,03	6,07	1,08	8,27	1,76	6,36	1,7	5,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	10,32	1,78	9	1,8	4,46	1,76	6,01	1,7	5,52
12	Real Estate	1,44	6,36	1,53	6,92	1,63	6,29	1,62	5,96	1,6	6,78
13	Jasa Perusahaan	0,01	8,03	0,01	5,18	0,01	6,97	0,01	6,13	0,01	6,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	6,07	4,96	7,96	5,57	10,51	5,29	1,89	5,19	4,56
15	Jasa Pendidikan	4,14	4,4	4,37	9,44	4,75	6,8	4,89	6,21	4,78	6,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,8	6,71	1,98	5,04	2,19	8,42	2,24	6,57	2,21	7,36
17	Jasa lainnya	1,19	5,08	1,28	8,9	1,36	8,5	1,43	7,25	1,42	7,06
<b>PDR B</b>		<b>100</b>	<b>7,04</b>	<b>100</b>	<b>4,2</b>	<b>100</b>	<b>5,29</b>	<b>100</b>	<b>5,48</b>	<b>100</b>	<b>6,01</b>

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Sedangkan jika dibandingkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dengan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, dan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata Kalimantan Tengah serta dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 19. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kotawaringin Barat	6,99	6,9	7,32	5,85	6,88
2	Kotawaringin Timur	7,79	7,37	7,66	7,93	7,99
3	Kapuas	6,81	7	7,27	7,29	7,62
4	Barito Selatan	5,24	5,31	5,54	5,62	5,84
<b>5</b>	<b>Barito Utara</b>	<b>7,04</b>	<b>4,2</b>	<b>5,29</b>	<b>5,48</b>	<b>6,01</b>
6	Sukamara	6,44	6,05	6,01	6,18	6,27
7	Lamandau	7	6,98	6,76	6,7	6,68
8	Seruyan	6,28	5,31	5,17	5,02	5,15
9	Katingan	6,33	6,55	6,53	6,54	6,56
10	Pulang Pisau	6,79	7,23	7,71	6,06	5,86
11	Gunung Mas	6,87	6,41	6,96	7	6,93
12	Barito Timur	6,73	5,25	5,16	5,5	5,98
13	Murung Raya	6,49	5,85	6,88	5,71	5,82
14	Palangka Raya	7,53	6,96	7,19	6,92	6,96
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>7,37</b>	<b>6,21</b>	<b>7,01</b>	<b>6,36</b>	<b>6,74</b>
<b>Nasional</b>		<b>5,56</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018